

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2000 DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM UPAYA PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA PELAJAR

Raha Saifudin Hamzah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Sports plays an important role in health and provides various benefits for life both physically and spiritually so that the government has an obligation to meet the sports needs of every society. This study aims to determine the extent to which the role of Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur in an effort to increase sports achievement archery branch among students. This research was conducted with descriptive research type using qualitative approach. Data collection techniques in this study using structured interviews and observations with the person in charge of PPLP program in East Java and the Management of PPLP Panahan of East Java. The results of this study indicate that the implementation of the development of sports achievements of student archery branches held by the Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur so far has been appropriate and is the implementation of the Peraturan Daerah No.32 Tahun 2000. In addition, this study also found that the policies that have been made by the Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur (DISPORA) to increase sports branches archery students in East Java there are two form namely PPLP and POPDA programs.

Keywords: Policy, Effectiveness, Sports, DISPORA, East Java.

PENDAHULUAN

Olahraga merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia, dengan berolahraga orang dapat menyalurkan ekspresinya melalui hobi dan mencukupi kepuasan fisik maupun psikis, sehingga kebugaran jasmani dan produktivitas kerja semakin meningkat. Olahraga mempunyai peran penting terhadap kesehatan dan memberikan berbagai macam manfaat bagi kehidupan baik dari segi jasmani maupun rohani. Salah satu manfaat yang paling penting adalah dapat menyehatkan mental, yaitu: meningkatkan kekuatan otak, melawan penuaan, meningkatkan perasaan bahagia dan meningkatkan kepercayaan diri.

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan setiap kegiatan olahraga. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat selain itu berguna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehat jasmani dan rohani yang tertuang dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa keolahragaan Nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta

mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 32 Tahun 2000 tentang Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. Pada pasal 24 ayat 1 (b), (c) & (d) pemerintah melaksanakan kegiatan usaha peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan bagi pelatih olahraga, pelajar dan mahasiswa. Pemerintah juga melaksanakan atau memfasilitasi kegiatan Pekan Olahraga Sekolah Dasar, Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi, Pekan Olahraga Pelajar Nasional maupun Pekan Olahraga Mahasiswa.¹

Dalam hal peningkatan prestasi para atlet pelajar, Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan merancang sebuah event pertandingan berskala antar pelajar se-provinsi Jawa Timur. Pekan Olahraga Pelajar Daerah merupakan gagasan kedua instansi tersebut untuk sarana evaluasi prestasi para atlet pelajar. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. POPDA merupakan ajang persiapan para atlet pelajar provinsi Jawa Timur sebelum menghadapi Pekan

¹ Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 32 Tahun 2000 tentang Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Propinsi Jawa Timur.

Olahraga Pelajar Nasional. Pekan Olahraga Pelajar Daerah mempertandingkan 14 cabang olahraga yang meliputi; sepak bola, basket, bola voli, sepak takraw, renang, atletik, pencak silat, catur, gulat, senam, tenis lapangan, bulu tangkis, tenis meja dan panahan.

Tujuan dari diadakannya POPDA di Jawa Timur adalah menjaring atlet-atlet dari Jawa Timur sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) & Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL). Tujuan yang lain adalah agar para atlet olahraga tidak hanya kuat dalam jiwa dan raga mereka tetapi para atlet juga mempunyai intelektualitas yang tinggi dimana intelektual yang mereka peroleh dari tempat menimba ilmu yaitu di sekolah. Oleh karena itu Pemerintah Jawa Timur berani menganggarkan dana APBD untuk menyelenggarakan POPDA yang diadakan setiap dua tahun sekali dan di ikuti oleh daerah – daerah yang berada dalam wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah juga mempunyai tujuan jangka panjang dari penyelenggaraan POPDA, yaitu untuk mengadakan seleksi jika ada suatu pertandingan olahraga serta perekrutan atlet dilakukan tidak dengan menggunakan cara instan, sehingga para atlet harus mempunyai tahapan – tahapan berjenjang yang menuntut atlet untuk konsisten menunjukkan kemampuan terbaiknya setiap saat.

Setelah beberapa kali penyelenggaraan POPDA dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Bapak Supratomo merencanakan POPDA akan diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Hal ini dilakukan karena menurutnya penyelenggaraan multievent seperti POPDA, PORSD, PORPROV menghabiskan dana terlalu banyak hanya untuk acara Pembukaan. Karena setiap tuan rumah menganggap pembukaan adalah menjadi gengsi tuan rumah, mereka menganggarkan dana yang sangat besar untuk acara pembukaan. Sehingga kepala Dispora menganggap kurang efisien. Untuk menggantikan kegiatan multievent tersebut, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan akan mengadakan kegiatan single event, yang dimana pertandingan akan di adakan oleh setiap cabang olahraga sehingga dapat menekan biaya terlalu besar yang dikeluarkan.

Wacana tersebut banyak mendapatkan pro kontra dari berbagai pihak, banyak pihak yang beranggapan bahwa single event kurang efektif dan multi event yang diselenggarakan 4 tahun sekali

terlalu lama, sehingga gairah prestasi atlet pelajar di Jawa Timur menurun. Sedangkan pertandingan di tingkat nasional tetap diadakan setiap 2 tahun sekali, seperti contohnya POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) yang tetap diselenggarakan. Menurut para pelaku olahraga di Jawa Timur, keputusan Dispora tersebut terlalu mekaksikan kehendak dan kurangnya koordinasi program dengan pemerintah pusat. Menurut mereka pemerintah Provisnsi Jawa Timur kurang tanggap dengan penurunan prestasi atlet pelajar Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil yang di dapat tim POPNAS Jawa Timur pada gelaran POPNAS ke 14 di Semarang Jawa Tengah pada bulan September lalu, Jawa Timur harus puas menempati peringkat ke empat kelasmen akhir pengumpul medali, Jawa Timur berada di Peringkat ke 4 dengan perolehan 33 medali emas, 29 medali perak dan 49 medali perunggu. Perolehan tersebut menurun dari hasil POPNAS ke 13 di Jawa Barat yang memperoleh 35 medali emas, 41 medali perak dan 54 medali perunggu.

Bukan hanya POPDA yang berubah dari setiap dua tahun sekali menjadi empat tahun sekali, Pekan Olahraga Provinsi (PORPOV) juga turut terjadi perubahan. Panitia pelaksana POPROV yakni KONI Provinsi Jawa Timur merubah Porprov menjadi empat tahun sekali. Hal tersebut dilakukan karena menurut hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaannya kedua kegiatan tersebut terlalu boros pengeluarannya. Terutama pada upacara pembukaan Porprov yang selalu membutuhkan biaya sangat tinggi hanya karena setiap upacara pembukaan tuan rumah ingin menyajikan upacara pembukaan yang terlalu mewah sehingga membutuhkan biaya tinggi. Menurut pelaku olahraga di Jawa Timur, kebijakan tersebut sangat tidak mencerminkan usaha dari pemerintah untuk lebih meningkatkan prestasi para atlet. Karena para atlet butuh kompetisi internal provinsi jawa timur untuk mengasah kemampuan mereka dan menambah pengalaman bertanding mereka. Dengan adanya kebijakan tersebut banyak yang beranggapan bisa menjadi menurunkan semangat para atlet. Maka perlu adanya solusi dari kebijakan tersebut, sehingga para pelaku olahraga di Jawa Timur tetap bersemangat untuk melakukan pembinaan para generasi muda potensial ini. Mengingat, kebijakan yang dibuat oleh DISPORA Jawa Timur khususnya untuk cabang panahan harus sejalan dan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 32

Tahun 2000 tentang Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur.

EFEKTIFITAS

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Menurut Budiani (2007), efektivitas merupakan kesesuaian antara hasil dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain sesuatu dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang dimaksud tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.²

Sedangkan menurut Prihatmanti (2013), efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk menyeleksi berbagai pilihan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mencapai hasil yang maksimal. Semakin besar output terhadap pencapaian tujuan maka hal tersebut adalah efektif sehingga efektivitas adalah acuan yang digunakan dalam membandingkan suatu proses yang memiliki tujuan dan sasaran yang dicapai. Selain itu, sesuatu dikatakan efektif jika mengacu pada tujuan yang dilakukan dan memiliki nilai ukur dan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh penilai.³

Efektivitas merupakan hubungan antara outcome dan output. Dapat juga dikatakan bahwa pengertian efektivitas mengacu pada hubungan antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, stsu kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan⁴. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya⁵.

² Ni Wayan Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, 2007, hal. 52

³ Marina Ayu Prihatmanti, *Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) Di TAS Dr. Soetomo Surabaya*, 2013. hal. 2

⁴ I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2008. hal. 23-24

⁵ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017. hal. 249.

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah seperangkat sistem prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengawal pembuatan keputusan dan meraih hasil yang rasional. Kebijakan merupakan pernyataan tujuan, dan diimplementasikan sebagai sebuah prosedur atau protokol. Kebijakan-kebijakan bisa membantu dalam hal pembuatan keputusan secara subjektif biasanya membantu manajemen senior dalam membuat keputusan yang harus mempertimbangkan keunggulan relatif dari sejumlah faktor sebelum membuat keputusan dan sebagai hasilnya seringkali sulit untuk diuji secara objektif, misalnya kebijakan keseimbangan pekerjaan kehidupan. Kebalikannya, kebijakan-kebijakan untuk membantu dalam pembuatan keputusan secara objektif biasanya memiliki sifat yang operasional dan bisa secara objektif diuji.

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu dimana dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dan kesempatan terkait usulan kebijaksanaan tersebut. Adapun pedoman yang dapat digunakan dalam memahami kebijakan bahwa kebijakan berbeda dengan keputusan, kebijakan tidak berbeda dengan administrasi, kebijakan terdiri dari perilaku dan harapan-harapan, kebijakan terdiri dari ada tidaknya suatu tindakan, kebijakan memiliki hasil, kebijakan memiliki tujuan tertentu, kebijakan berasal dari proses dalam watu tertentu, kebijakan memiliki hubungan antar organisasi maupun intra-organisasi, kebijakan publik memiliki peran dari lembaga-lembaga pemerintahan, dan kebijakan dibentuk dan dipahami secara subyektif.⁶

Kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu⁷. Pada

⁶ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama, Senayan, Jakarta Pusat, 2014, hal. 2-3.

⁷ Agustinus Hermino, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan: Tinjauan Perilaku*

dasarnya, setiap kebijakan mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau ingin meraih dampak-dampak yang diinginkan. Namun demikian, karena proses kebijakan merupakan proses yang kompleks, maka seringkali program-program kebijakan tidak dapat meraih tujuan atau dampak yang diinginkan⁸.

METODE PENELITIAN TIPE PENELITIAN

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif karena berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif menggambarkan kondisi yang terjadi atas penerapan suatu inovasi program.

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik tersebut dilakukan dengan menentukan informan yang didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan sehingga memperoleh data secara langsung dari informan tersebut.

TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan ialah model dari Miles and Huberman yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan secara terus menerus pada setiap tahapan peneliti sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) provinsi Jawa Timur antara lain ada dua program utama yaitu PPLP dan POPDA. Pertama, program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) ini merupakan program yang berasal dari Kementerian yang dijalankan oleh Dinas

Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) di masing-masing daerah. Sosialisasi terkait dengan program PPLP dilakukan di cabang olahraga yang menyelenggarakan kejuaraan nasional yang salah satunya yaitu cabang olahraga panahan PPLP ini hanya dapat diikuti oleh atlet yang telah lolos seleksi yang dilakukan oleh pihak cabang olahraga. Dalam pelaksanaan PPLP ini Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (DISPORA) selalu berkomunikasi dengan pengurus provinsi cabang olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) untuk menjalin kerjasama dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program PPLP dilapangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional berikut, "Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan".

Dalam program PPLP ini para atlet dan pelatih diberikan fasilitas mulai dari asrama, uang transport, uang saku, try out, konsumsi. Dengan adanya serangkaian hal tersebut maka diharapkan para atlet dapat memenuhi target capaiannya yaitu mempertahankan juara umum di kejurnas antar PPLP/PPLPD & SKO. Sehingga setelah lulus dari PPLP para atlet dapat bersaing di PUSLATDA & PELATNAS. Proses pengadaan fasilitas dan lain-lain program PPLP cabang olahraga panahan ini mengandalkan pengalokasian dana APBBN provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian kepemudaan dan keolahragaan. Program PPLP ini merupakan program yang berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan prestasi para atlet, sehingga perkembangan PPLP untuk cabang panahan dapat dikatakan telah sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi atlet binaan program PPLP cabang olahraga panahan ini yang sejauh ini sangat baik yang ditandai dengan perolehan 11 medali emas pada kejuaraan nasional tahun 2017. Adapun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program PPLP ini adalah kesulitan pengontrolan kegiatan atlet di daerah masing-masing karena terkendala fasilitas yang belum memadai atau maksimal. Kebijakan DISPORA terkait PPLP ini sendiri dinilai masing-masing belum maksimal yang ditandai dengan adanya pengurangan kuota atlet cabang olahraga panahan akibat adanya penambahan cabang baru dalam program PPLP tersebut.

Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning. Jakarta: PT Gramedia, 2013, hal. 133

⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress, 2007. hal. 255

Kedua, kebijakan terkait program POPDA atau Pengembangan Olahraga Presatasi Daerah. Dalam pelaksanaan POPDA ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) provinsi Jawa Timur telah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan beberapa pihak mulai dari *stakeholder* di daerah dinas-dinas terkait dan pengurus cabang olahraga. Dalam pendanaannya POPDA ini didanai oleh anggaran pemerintah melalui pihak DISPORA dan bekerjasama dengan pemerintah daerah tuan rumah tempat diselenggarakannya POPDA. POPDA ini diselenggarakan di masing-masing daerah untuk menunjang pemerataan ekonomi masing-masing daerah. Perencanaan dan pengkondisian tempat penyelenggaraan POPDA ini dilakukan pada rapat bidding tuan rumah ketika rapat tahunan. Sejauh ini POPDA diharapkan dapat melahirkan atlet berprestasi untuk mengisi kuota 18 atlet (9 putra dan 9 putri) untuk mewakili Jawa Timur di POPNAS. Mengingat dengan adanya POPDA ini prestasi atlet olahraga panahan di Jawa Timur telah mengalami peningkatan. Kendala penyelenggaraan POPDA ini terletak pada kesiapan tuan rumah masing-masing daerah khususnya dalam hal penyiapan lapangan pertandingan dan tempat penginapan. Kebijakan pengurangan POPDA dari dua tahun sekali menjadi empat tahun sekali menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi mengurangi anggaran dana dan sisi lain mengurangi kesempatan bertanding para atlet dalam menunjukkan hasil latihannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengembangan prestasi olahraga cabang panahan pelajar yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa sejauh ini telah sesuai dan merupakan implementasi dari Peraturan Daerah No.32 Tahun 2000. Pelaksanaan dan pengembangan prestasi yang dimaksud tersebut dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) provinsi Jawa Timur antara lain, melakukan sosialisasi keolahragaan berdasar pada Peraturan Daerah No.32 Tahun 2000 yang mengacu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional; menjalin kerjasama dengan pihak cabang olahraga dan klub-klub di daerah; memberikan pembinaan dan pelatihan untuk atlet, klub, dan

pelatih; menyelenggarakan kompetisi ditingkat daerah hingga nasional (POPDA, POPWIL dan POPNAS) khususnya untuk atlet yang masih berstatus pelajar; serta memberikan target pencapaian dalam berupa target juara di kejuaraan nasional.

2. Kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) untuk peningkatan olahraga cabang panahan pelajar di Jawa Timur ada dua yaitu berupa adanya program PPLP dan POPDA. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) ini merupakan program yang berasal dari Kementrian yang dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) di masing-masing daerah. PPLP hanya dapat diikuti oleh atlet yang memiliki prestasi yang baik dengan lolos seleksi. Pengontrolan pelaksanaan PPLP dilakukan dengan pengurus provinsi cabang olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI). Program PPLP ini merupakan program yang berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan prestasi para atlet. Sedangkan POPDA merupakan Pengembangan Olahraga Presatasi Daerah yang diselenggarakan di masing-masing daerah untuk menunjang pemerataan ekonomi masing-masing daerah. Dalam program PPLP ini para atlet dan pelatih diberikan fasilitas mulai dari asrama, uang transport, uang saku, try out, konsumsi. Dengan adanya serangkaian hal tersebut maka diharapkan para atlet dapat memenuhi target capaiannya yaitu mempertahankan juara umum di kejurusan antar PPLP/PPLPD & SKO. Kebijakan pengurangan POPDA dari dua tahun sekali menjadi empat tahun sekali menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi mengurangi anggaran dana dan sisi lain mengurangi kesempatan bertanding para atlet dalam menunjukkan hasil latihannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, N. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran karang Taruna "EKA TARUNA BHAKTI" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, Vol 2(No 1), 49-57.
- Kriswantoro. (2016). *Pengaruh Latihan Variasi Kelincahan Terhadap Keterampilan Dribbling Sepakbola Pada Pemain Ssb Bina Taruna Tambakromo Pati Tahun*

2015. *Seminar Nasional Olahraga 2016 Program S3 Pendidikan Olahraga Pascasarjana Unj.*
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammadiyah. (2015). *Pengaruh Metode Latihan Lari Percepatan Dan Lari Interval Terhadap Keterampilan Bermain Sepakbola*. Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala. .
- Nazaruddin. (2013). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program E-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data di Kabupaten Hulu Sungai Utara). Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol. 2 (2), 218-237
- Nurhidayat, Y. (2005). *Evaluasi Penerapan Anggaran Sebagai Alat Mengukur Kinerja Dalam Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur)*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Propinsi Jawa Timur. (n.d.). Jawa Timur, Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. (2012). Jawa Timur, Indonesia.
- Prihatmanti, M. (2013). Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) Dalam Pemenuhan Hak Anak Balita Dari Keluarga Miskin Di Taman Anak Sejahtera Dr. Soetomo Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1*(No 1).
- Sin, Tjung Hauw. (2016). *Implementasi High Touch Terhadap Prestasi Atlet Dayung Sumatera Barat.*, Sport Sciece. Jurnal Ilmu Keolahragaan dan Pendidikan Jasmani.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (n.d.).